

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Hardiyansyah. (2018). *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Juanim. (2018). *Modul Praktika Metode Penelitian Ekonomi & Bisnis Pengelolaan Data SPSS*. Bandung: Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Pasundan.
- Mariane, I. (2018). *Azas- Azas Manajemen*. Bandung: Kencana Utama.
- Pasolong, H. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, H. (2019). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Priansa, D. J. (2013). *Manajemen Perkantoran Efektif, Efesien dan Profesional*. Bandung: Alfabeta.
- Silalahi, U. (2016). *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Sinar Baru Algensindo.
- Silalahi, U. (2003). *Studi Tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori dan Dimensi*. Sinar Baru Algensindo.
- Steers, R. M. (2012). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumiati, I. (2012). *Statistik*. Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pasundan.
- Sumiati, I. (Edisi 2014-2015). *Statistik*. Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pasundan.
- Sumiati, I. (Edisi 2019). *Sampling*. Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pasundan.
- Syafri, W. (2012). *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.

B. Dokumen

UU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah

UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan PTSP

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perizinan

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung

Peraturan Pemerintah No 18/2016 Tentang Perangkat Daerah dimana sebelumnya organisasi ini bernama Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung

Peraturan Pemerintah No 18/2016 Tentang Perangkat Daerah dimana pada pasal 39 ayat (1) disebutkan bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat, daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu Daerah Kabupaten Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang penanaman modal, karena itu, organisasi yang tadinya berbentuk badan ini kemudisn menjadi Dinas.